**PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN KELURAHAN PASIR GINTUNG DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Tugas Ujian Tengah Semester)**

**Oleh**

**NAZWA APHSARI NANDINI**

**NPM 2416041092**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

**DAFTAR ISI**

Isi

[**BAB I 3**](#_Toc211973294)

[**1,1 Latar Belakang 3**](#_Toc211973295)

[**1.2 Rumusan Masalah 8**](#_Toc211973296)

[**1.3 Tujuan 8**](#_Toc211973297)

[**BAB II 10**](#_Toc211973298)

[**TINJUAN PUSTAKA 10**](#_Toc211973299)

[**2.1 Penelitian Terdahulu 10**](#_Toc211973300)

[**2.2 Landasan Teori 13**](#_Toc211973301)

[**2.2.1 Grand Theory: Teori Kepemimpinan 13**](#_Toc211973302)

[**2.2.2 Middle Range Theory: Teori Partisipasi Masyarakat 15**](#_Toc211973303)

[**2.2.3 Applied Theory: Teori Good Governance dan Pemberdayaan Masyarakat 16**](#_Toc211973304)

[**2.2.4 Keterkaitan Antar Teori 17**](#_Toc211973305)

[**2.2.5 Sintesis Teoretis 17**](#_Toc211973306)

[**2.3 KERANGKA BERPIKIR 18**](#_Toc211973307)

[**BAB III 20**](#_Toc211973308)

[**METODOLOGI PENELITIAN 20**](#_Toc211973309)

[**3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 20**](#_Toc211973310)

[**3.2 Fokus Penelitian 21**](#_Toc211973311)

[**3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 22**](#_Toc211973312)

[**3.4 Fokus Penelitian 24**](#_Toc211973313)

[**3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian 24**](#_Toc211973314)

[**3.6 Teknik Pengumpulan Data 26**](#_Toc211973315)

[**3.7 Teknik Analisis Data 28**](#_Toc211973316)

[**3.8 Teknik Keabsahan Data 31**](#_Toc211973317)

# BAB I

## 1,1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses yang berkesinambungan dan terarah untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan pembangunan nasional adalah pembangunan daerah, yang secara langsung melibatkan pemerintah daerah, termasuk pemerintah kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan lurah menjadi sangat penting karena lurah merupakan ujung tombak pemerintah daerah yang bertugas mengoordinasikan, menggerakkan, serta memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan.

Kepemimpinan lurah memiliki posisi strategis dalam proses pembangunan masyarakat. Lurah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan administratif dari pemerintah kota, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang berperan dalam membina, memotivasi, dan mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan di lingkungannya. Menurut Siagian (2010), kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain agar bersedia bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kepemimpinan lurah menjadi faktor kunci dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Partisipasi yang tinggi menunjukkan adanya kesadaran, kemauan, dan tanggung jawab warga terhadap lingkungan sosialnya. Menurut Ife (1995), pembangunan masyarakat yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan kelurahan, lurah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan iklim partisipatif yang dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap program-program pembangunan.

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk yang padat dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 1.166.522 jiwa dengan laju pertumbuhan sekitar 1,14% per tahun. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota, terutama dalam mengelola pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Salah satu wilayah yang memiliki dinamika pembangunan cukup kompleks adalah **Kelurahan Pasir Gintung**, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, yang merupakan salah satu kelurahan padat penduduk dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam.

Kelurahan Pasir Gintung merupakan wilayah yang strategis karena berada di kawasan pusat kota, dekat dengan sentra ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih belum optimal. Berdasarkan hasil observasi dan laporan kelurahan tahun 2024, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih kurang aktif dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), kegiatan kebersihan lingkungan, dan program pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan lurah dalam membangun komunikasi dan partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan inklusif.

Kepemimpinan lurah yang efektif ditandai oleh kemampuan dalam melakukan koordinasi antar-stakeholder, baik dengan tokoh masyarakat, RT/RW, maupun lembaga kemasyarakatan kelurahan (LPM, PKK, Karang Taruna). Menurut Kartono (2014), kepemimpinan yang baik harus mampu memadukan antara kekuasaan formal dengan kemampuan personal untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat. Dalam konteks pemerintahan kelurahan, hal ini berarti lurah perlu memiliki kemampuan komunikasi yang terbuka, sikap partisipatif, dan keteladanan moral agar dapat menjadi figur panutan yang dihormati oleh warga.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk, seperti keikutsertaan dalam musyawarah pembangunan, keterlibatan dalam gotong royong, serta dukungan terhadap program pemerintah kelurahan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu, semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar pula peluang keberhasilan pembangunan di tingkat kelurahan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di beberapa kelurahan di Kota Bandar Lampung masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (DPMK) Kota Bandar Lampung tahun 2023, sekitar 42% masyarakat masih belum aktif dalam kegiatan pembangunan di tingkat lingkungan. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya komunikasi antara aparat kelurahan dengan warga, lemahnya kepemimpinan partisipatif lurah, dan minimnya transparansi dalam penyusunan program pembangunan.

Khusus di Kelurahan Pasir Gintung, fenomena tersebut juga tampak dari rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kelurahan. Misalnya, pelaksanaan kegiatan musrenbang tahun 2024 hanya dihadiri oleh sekitar 56% perwakilan masyarakat dari RT/RW yang diundang. Selain itu, beberapa program pemberdayaan seperti pelatihan ekonomi kreatif dan kerja bakti lingkungan masih didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan partisipasi antarwarga dan berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.

Dalam perspektif administrasi publik, kepemimpinan lurah berperan sebagai **agen perubahan (agent of change)** yang berfungsi menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Denhardt dan Denhardt (2003) dalam konsep The New Public Service menekankan bahwa pemimpin publik seharusnya “melayani, bukan mengarahkan,” dan lebih berorientasi pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip tersebut, lurah diharapkan mampu membangun hubungan yang harmonis, partisipatif, dan berkeadilan dengan warga.

Kepemimpinan yang berhasil mendorong partisipasi masyarakat biasanya memiliki beberapa ciri utama: transparansi dalam pengambilan keputusan, keterbukaan terhadap aspirasi, kemampuan memecahkan masalah bersama, serta kesediaan memberi ruang bagi warga untuk berinisiatif. Dalam konteks Kelurahan Pasir Gintung, lurah harus mampu berperan tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai fasilitator sosial dan inovator pembangunan yang menumbuhkan kepercayaan publik. Kepercayaan ini sangat penting karena menjadi dasar dari partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.

Lebih jauh, peran kepemimpinan lurah juga terkait erat dengan faktor sosial budaya masyarakat setempat. Masyarakat Pasir Gintung memiliki latar belakang sosial yang heterogen dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang bervariasi. Keberagaman ini menjadi potensi sekaligus tantangan dalam mewujudkan partisipasi kolektif. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan gaya kepemimpinan yang adaptif dan komunikatif. Menurut Hersey dan Blanchard (1993), gaya kepemimpinan situasional yang fleksibel mampu meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemimpin dan pengikut, sehingga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh sejauh mana lurah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. UNDP (1997) menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kepemimpinan lurah dapat mendorong masyarakat untuk lebih percaya dan mau terlibat dalam proses pembangunan.

Melihat fenomena yang terjadi di Kelurahan Pasir Gintung, tampak bahwa masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan terkait partisipasi masyarakat. Berbagai program pembangunan telah diluncurkan, seperti kegiatan kebersihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan penataan fasilitas publik, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran kepemimpinan lurah dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan tersebut.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kepemimpinan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat serta menemukan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambatnya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Bandar Lampung, dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan aparatur kelurahan di masa depan.Dengan demikian, penelitian berjudul **“Peran Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Kelurahan Pasir Gintung di Kota Bandar Lampung”** dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami keterkaitan antara kepemimpinan lurah dan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan di tingkat kelurahan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori administrasi publik, khususnya dalam bidang kepemimpinan pemerintahan lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis komunitas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diketahui bahwa keberhasilan pembangunan kelurahan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kepemimpinan lurah mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Meskipun secara normatif prinsip pembangunan partisipatif telah diterapkan dalam berbagai program pemerintah, kenyataannya di beberapa kelurahan di Kota Bandar Lampung masih ditemukan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran kepemimpinan lurah dalam memotivasi, menggerakkan, serta membangun kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pembangunan wilayahnya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Bagaimana peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kelurahan di Kota Bandar Lampung?**
2. **Apa saja bentuk partisipasi masyarakat yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan di Kota Bandar Lampung?**
3. **Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kelurahan di Kota Bandar Lampung?**

## 1.3 Tujuan

Tujuan penelitian berfungsi untuk menjelaskan arah dan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kelurahan di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan di Kota Bandar Lampung.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kelurahan di Kota Bandar Lampung.

# BAB II

# TINJUAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh **Sari, M. D. (2022)** berjudul *“Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kelurahan Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung”* dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, menggunakan metode **kualitatif deskriptif**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa **gaya kepemimpinan partisipatif lurah** berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga terhadap program pembangunan di lingkungan kelurahan. Lurah yang terbuka terhadap aspirasi warga dan aktif berkomunikasi dalam forum-forum seperti *musyawarah perenc3anaan pembangunan kelurahan (Musrenbangkel)* terbukti mampu mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong, kebersihan lingkungan, dan pelaksanaan program pemberdayaan. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa **kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif** memiliki korelasi positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

Selanjutnya, penelitian oleh **Rakhman, Kharisma, dan Suryadana (2023)** dalam jurnal *Leadership and Governance Review* Universitas Gadjah Mada berjudul *“Transformational Leadership and Community-Based Development in Village Tourism Management”* menemukan bahwa penerapan **kepemimpinan transformasional berbasis komunitas** mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul. Lurah atau kepala desa yang memiliki visi jangka panjang, mampu memotivasi warga, dan memberi ruang bagi inovasi terbukti berhasil menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kepemimpinan yang inspiratif dan kolaboratif merupakan kunci sukses dalam pembangunan berbasis masyarakat.

Penelitian lain oleh **Taurista dan Choiriyah (2024)** dalam jurnal *International Journal of Community and Communication Development* berjudul *“Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Infrastruktur Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo”* juga menyoroti peran komunikasi kepemimpinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang komunikatif, transparan, serta berpendidikan tinggi mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Kepercayaan ini menjadi faktor utama yang meningkatkan partisipasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, seperti jalan lingkungan dan drainase.

Hasil serupa ditemukan oleh **Rahmah, Megawati, dan Pratama (2024)** dalam jurnal *Jurnal Studi Kebijakan dan Pembangunan Desa*, Universitas Negeri Surabaya, yang meneliti efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali masih berada pada tingkat “konsultasi”, belum mencapai “kontrol warga penuh” sebagaimana diidealkan oleh teori tangga partisipasi Arnstein (1969). Hal ini disebabkan oleh faktor kepemimpinan yang belum sepenuhnya membuka ruang dialog serta keterbatasan kapasitas warga dalam proses perencanaan. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa **efektivitas kepemimpinan lurah atau kepala desa sangat menentukan tingkat kualitas partisipasi masyarakat.**

Selain itu, **Putra (2023)** dalam jurnal *Jurnal Ilmu Sosial dan Kebijakan Otonomi Daerah* Universitas Brawijaya dengan judul *“Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa”* menemukan bahwa partisipasi publik dalam proses pembangunan desa sering kali bersifat formalitas. Pemimpin lokal cenderung melibatkan masyarakat hanya pada tahap awal (perencanaan), namun kurang dalam pelaksanaan dan pengawasan. Studi ini memperkuat asumsi bahwa **kepemimpinan yang tidak partisipatif cenderung menghasilkan partisipasi semu (tokenisme)**, bukan partisipasi substantif yang benar-benar mencerminkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh.

Selanjutnya, **Anshori, Maksum, dan Darmajanti (2017)** dalam penelitian berjudul *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Perkotaan”* yang diterbitkan oleh *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi warga di kawasan perkotaan disebabkan oleh lemahnya peran pemimpin lokal serta kurangnya forum komunikasi antarwarga. Studi ini merekomendasikan bahwa peran lurah harus diperkuat tidak hanya dalam fungsi administratif, tetapi juga dalam peran sosial kemasyarakatan yang lebih intensif.

Penelitian oleh **Hasanawi, Saputra, dan Yulianto (2019)** dalam *Jurnal Perencanaan Pembangunan Bappenas* berjudul *“Governance dan Partisipasi Masyarakat dalam Program Peningkatan Kualitas Permukiman”* menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh sejauh mana pemimpin lokal mampu menerapkan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Semakin baik penerapan prinsip tersebut, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat dan partisipasi dalam program pembangunan kawasan permukiman.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lurah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Perbedaan hasil di berbagai lokasi menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan tingkat komunikasi yang dibangun antara lurah dan warga. Namun secara umum, semua penelitian sepakat bahwa **model kepemimpinan partisipatif, komunikatif, dan transparan** merupakan bentuk kepemimpinan yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di tingkat kelurahan atau desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan empiris dengan menitikberatkan pada **analisis mendalam mengenai praktik kepemimpinan lurah di Kelurahan Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung**, dalam konteks pembangunan kelurahan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat, yang pada penelitian sebelumnya belum banyak dibahas secara komprehensif di wilayah perkotaan Bandar Lampung.

## 2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel utama, yaitu **kepemimpinan lurah** sebagai variabel independen dan **partisipasi masyarakat dalam pembangunan** sebagai variabel dependen. Untuk memahami kedua variabel tersebut secara ilmiah, digunakan tiga tingkatan teori, yakni **Grand Theory**, **Middle Range Theory**, dan **Applied Theory**.

## 2.2.1 Grand Theory: Teori Kepemimpinan

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Teori Kepemimpinan (Leadership Theory)**, yang menjelaskan hakikat dan dinamika kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut **Robbins dan Judge (2017)**, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi kelompok agar mencapai tujuan organisasi. Sementara **Stogdill (1974)** menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses memengaruhi aktivitas kelompok yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks pemerintahan kelurahan, kepemimpinan lurah berperan penting dalam memotivasi, mengarahkan, dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan wilayahnya. Lurah tidak hanya bertindak sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai figur sosial yang mampu menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat (Siagian, 2013).

Beberapa teori kepemimpinan yang relevan antara lain:

1. **Teori Kepemimpinan Sifat (Trait Theory)** — menyatakan bahwa seorang pemimpin efektif memiliki sifat-sifat tertentu seperti kepercayaan diri, integritas, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi (Yukl, 2010).
2. **Teori Kepemimpinan Perilaku (Behavioral Theory)** — menekankan pada tindakan pemimpin, bukan sifatnya. Pemimpin efektif adalah yang mampu menunjukkan perilaku demokratis, partisipatif, dan suportif terhadap bawahannya (Lewin, Lippitt, & White, 1939).
3. **Teori Kepemimpinan Situasional (Situational Leadership Theory)** — dikembangkan oleh **Hersey dan Blanchard (1982)**, yang menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi dan tingkat kesiapan pengikut. Dalam konteks kelurahan, lurah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi sosial masyarakat akan lebih berhasil meningkatkan partisipasi warga.

Dengan demikian, teori kepemimpinan menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana perilaku dan strategi kepemimpinan lurah dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## 2.2.2 Middle Range Theory: Teori Partisipasi Masyarakat

Teori tingkat menengah (middle theory) yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Teori Partisipasi Masyarakat**, yang menjelaskan bentuk, tingkat, dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Menurut **Cohen dan Uphoff (1977)**, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi tidak hanya berupa kehadiran fisik, tetapi juga meliputi pemberian ide, sumbangan tenaga, materi, maupun keputusan bersama.

**Arnstein (1969)** dalam *A Ladder of Citizen Participation* mengemukakan delapan tingkat partisipasi masyarakat yang dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. **Non-participation** (manipulasi, terapi),
2. **Tokenism** (informasi, konsultasi, penentraman),
3. **Citizen Power** (kemitraan, delegasi kekuasaan, kontrol warga).

Dalam konteks pemerintahan kelurahan, tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dari sejauh mana warga dilibatkan secara nyata dalam kegiatan pembangunan, baik dalam Musrenbangkel, gotong royong, maupun pengawasan penggunaan dana kelurahan.

Sementara itu, **Rondinelli (1991)** menyatakan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal sangat ditentukan oleh peran pemimpin lokal yang mampu memfasilitasi komunikasi, mengurangi konflik kepentingan, dan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat merupakan hasil interaksi antara **kepemimpinan yang efektif** dan **kepercayaan sosial masyarakat terhadap pemimpin lokal**.

## 2.2.3 Applied Theory: Teori Good Governance dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada tataran terapan, penelitian ini menggunakan dua teori utama yang berkaitan langsung dengan praktik pemerintahan lokal, yaitu **Teori Good Governance** dan **Teori Pemberdayaan Masyarakat**.

1. **Teori Good Governance**

Menurut **UNDP (1997)**, good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip **partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, responsivitas, serta supremasi hukum**. Dalam konteks pemerintahan kelurahan, lurah menjadi aktor utama dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar masyarakat merasa dilibatkan dan percaya terhadap kebijakan pembangunan.

Menurut **Dwiyanto (2006)**, prinsip partisipasi masyarakat dalam good governance menuntut adanya kemauan politik dari pemimpin lokal untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat. Lurah yang menerapkan prinsip ini akan menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan mendorong warga untuk turut serta dalam setiap proses pembangunan.

1. **Teori Pemberdayaan Masyarakat**

Teori pemberdayaan masyarakat (community empowerment theory) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya dan kebutuhan lokal. **Chambers (1995)** menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan agar masyarakat memiliki *power to act*, yakni kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di wilayahnya.

Dalam konteks ini, peran lurah tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan. Lurah yang berorientasi pada pemberdayaan akan mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan.

## 2.2.4 Keterkaitan Antar Teori

Keterkaitan antara teori-teori di atas menggambarkan hubungan yang logis antara variabel penelitian.

* **Teori Kepemimpinan** menjelaskan bagaimana gaya dan perilaku pemimpin (lurah) dapat memengaruhi pengikutnya (masyarakat).
* **Teori Partisipasi Masyarakat** menjelaskan bentuk dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
* **Teori Good Governance dan Pemberdayaan Masyarakat** memberikan dasar aplikatif bagaimana kepemimpinan partisipatif dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan lokal yang demokratis dan transparan.

Secara konseptual, semakin partisipatif, komunikatif, dan responsif gaya kepemimpinan lurah, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Sebaliknya, kepemimpinan yang otoriter dan tertutup cenderung menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

## 2.2.5 Sintesis Teoretis

Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesiskan bahwa kepemimpinan lurah yang efektif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kelurahan. Gaya kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif, dan berbasis pemberdayaan terbukti mampu meningkatkan kepercayaan dan kesadaran warga untuk terlibat dalam pembangunan.

Dengan mengacu pada teori kepemimpinan (Robbins, 2017; Hersey & Blanchard, 1982), teori partisipasi (Cohen & Uphoff, 1977; Arnstein, 1969), serta teori good governance (UNDP, 1997; Dwiyanto, 2006), penelitian ini menempatkan lurah sebagai aktor strategis yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai pembangunan kelurahan yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## 2.3 KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan hubungan antara **kepemimpinan lurah** dengan **partisipasi masyarakat**dalam mendukung **pembangunan kelurahan**. Penelitian berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat kelurahan sangat dipengaruhi oleh gaya dan peran kepemimpinan lurah dalam menggerakkan partisipasi warga.

Kepemimpinan lurah yang **partisipatif, komunikatif, dan responsif** akan menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Lurah yang mampu menerapkan prinsip **good governance**—seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas—akan menumbuhkan **kepercayaan dan motivasi masyarakat** untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan (UNDP, 1997; Dwiyanto, 2006).

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya keterlibatan mereka dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Cohen & Uphoff, 1977). Proses ini juga sejalan dengan teori **pemberdayaan masyarakat** yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kemandirian warga (Chambers, 1995).

Dengan demikian, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Kepemimpinan Lurah yang Efektif**  
→ Menerapkan prinsip good governance  
→ Meningkatkan kepercayaan dan kapasitas masyarakat  
→ Mendorong partisipasi aktif warga  
→ Mewujudkan keberhasilan pembangunan kelurahan.

# **BAB III**

# **METODOLOGI PENELITIAN**

## **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif** dengan pendekatan **deskriptif**. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kelurahan, bukan untuk mengukur besaran kuantitatif suatu variabel.

Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah. Pendekatan ini relevan karena peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi, komunikasi, dan konteks budaya di lingkungan kelurahan.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran faktual, sistematis, dan akurat mengenai karakteristik kepemimpinan lurah serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di **Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung**. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana proses kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap keterlibatan warga dalam pembangunan lokal.

## 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan arah utama dalam pelaksanaan penelitian yang berfungsi sebagai batasan agar proses pengumpulan data tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian digunakan untuk menentukan aspek-aspek apa saja yang perlu diamati dan digali lebih dalam dari fenomena sosial yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini, fokus diarahkan pada dua aspek utama yang saling berkaitan, yaitu gaya kepemimpinan kepala desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kedua aspek tersebut menjadi pusat perhatian karena diyakini memiliki hubungan yang erat dalam menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat desa.

1. **Gaya Kepemimpinan Kepala Desa**  
   Aspek pertama berfokus pada bagaimana kepala desa menjalankan perannya sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa. Gaya kepemimpinan di sini mencakup cara kepala desa dalam mengambil keputusan, memberikan arahan, memotivasi perangkat dan masyarakat, serta membangun komunikasi dan hubungan kerja dengan seluruh unsur yang terlibat dalam pemerintahan dan kegiatan pembangunan.  
   Gaya kepemimpinan kepala desa dapat terlihat dari pola interaksi sehari-hari, sejauh mana kepala desa bersifat partisipatif, terbuka terhadap aspirasi masyarakat, serta mampu menjadi teladan dan penggerak dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan memahami gaya kepemimpinan yang diterapkan, peneliti dapat menilai sejauh mana kepemimpinan tersebut memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat di desa.
2. **Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**  
   Aspek kedua menitikberatkan pada bagaimana masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga pengawasan dan evaluasi program pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari seberapa besar kesadaran, kemauan, dan keterlibatan mereka dalam mendukung program yang digagas oleh pemerintah desa.  
   Partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari jumlah kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga dari kontribusi ide, tenaga, dan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan hasil pembangunan. Partisipasi yang tinggi menunjukkan adanya rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program pembangunan yang dijalankan, yang biasanya dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala desa dalam mengarahkan, menginspirasi, dan mengajak masyarakat untuk terlibat.

Fokus penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana karakter kepemimpinan kepala desa memengaruhi motivasi, kesadaran, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama.

## **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini ditetapkan di **Kelurahan Way Halim Permai**, Kecamatan **Way Halim**, **Kota Bandar Lampung**, Provinsi **Lampung**. Pemilihan lokasi dilakukan secara **purposive** (sengaja) dengan mempertimbangkan relevansi antara fenomena yang diteliti dan kondisi sosial wilayah tersebut.

Menurut **penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari, M. D. (2022)** dalam skripsinya yang berjudul “Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kelurahan Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung”, diketahui bahwa Kelurahan Way Halim Permai merupakan wilayah dengan tingkat aktivitas pembangunan yang cukup tinggi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan lurah berperan penting dalam menggerakkan partisipasi warga, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu tersebut, Kelurahan Way Halim Permai dianggap sebagai lokasi yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika sosial dan kepemimpinan yang menarik, di mana lurah berperan aktif dalam mendorong keterlibatan masyarakat, namun masih menghadapi kendala berupa perbedaan tingkat kesadaran dan partisipasi warga di berbagai kegiatan pembangunan. Dengan demikian, lokasi ini mampu memberikan data empiris yang kaya dan mendalam untuk memahami **peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kelurahan**.

Secara geografis, Kelurahan Way Halim Permai merupakan salah satu kelurahan dengan kepadatan penduduk tinggi di Kota Bandar Lampung. Wilayah ini memiliki komposisi sosial yang beragam, meliputi kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi, pendidikan, dan profesi yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi lurah dalam mengelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Adapun **waktu pelaksanaan penelitian** ini direncanakan berlangsung selama **tiga bulan**, yaitu dari **Oktober sampai dengan Desember 2025**. Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi:

1. **Tahap Persiapan** — penyusunan proposal, studi pustaka, dan perizinan penelitian.
2. **Tahap Pengumpulan Data** — pelaksanaan wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan di Kelurahan Way Halim Permai.
3. **Tahap Analisis Data** — reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.
4. **Tahap Pelaporan** — penyusunan hasil penelitian secara sistematis sesuai kaidah ilmiah.

Dengan mengacu pada hasil penelitian **Sari (2022)** dan kondisi aktual wilayah, pelaksanaan penelitian di Kelurahan Way Halim Permai diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kepemimpinan lurah berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kelurahan di Kota Bandar Lampung.

## **3.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis:

1. **Peran kepemimpinan lurah** dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kelurahan.
2. **Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat** dalam proses pembangunan di Kelurahan Pasir Gintung.
3. **Faktor-faktor pendukung dan penghambat** dalam pelaksanaan kepemimpinan lurah yang berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat.

Fokus tersebut menjadi batasan agar penelitian berjalan sistematis dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## **3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif**, sehingga jenis data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan berupa **uraian mendalam (deskriptif)** yang menggambarkan fenomena sosial secara menyeluruh dan kontekstual. Menurut **Sari (2022)**, penelitian kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman terhadap suatu peristiwa sosial dari sudut pandang partisipan, bukan pada pengukuran kuantitatif. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**, yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan **data utama** yang diperoleh **langsung dari sumber lapangan** melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data ini dikumpulkan dari informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam proses kepemimpinan lurah serta kegiatan pembangunan di Kelurahan Way Halim Permai.  
Adapun informan utama dalam penelitian ini meliputi:

* **Lurah Way Halim Permai**, sebagai pemimpin administratif sekaligus pelaksana kebijakan pembangunan di tingkat kelurahan;
* **Perangkat Kelurahan**, seperti sekretaris kelurahan dan kepala seksi bidang pembangunan;
* **Tokoh masyarakat dan ketua RT/RW**, yang berperan dalam menggerakkan partisipasi warga;
* **Warga masyarakat**, yang menjadi pelaku dan penerima manfaat dari kegiatan pembangunan.

Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali persepsi, pandangan, serta pengalaman informan terkait dengan kepemimpinan lurah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.  
Pendekatan ini sejalan dengan metode yang digunakan oleh **Sari (2022)**, yang juga mengandalkan wawancara dan observasi langsung untuk memahami bagaimana gaya kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan **data pendukung** yang diperoleh dari berbagai **dokumen tertulis dan sumber literatur** yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

* Dokumen resmi dari **Kantor Kelurahan Way Halim Permai**, seperti profil kelurahan, laporan kegiatan pembangunan, serta data statistik wilayah;
* Arsip dan laporan dari **Pemerintah Kota Bandar Lampung** terkait program pembangunan masyarakat;
* Buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, termasuk karya **Sari (2022)**, yang digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis data;
* Artikel ilmiah dan laporan kebijakan mengenai peran kepemimpinan lurah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal.

Pemanfaatan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat validitas hasil penelitian melalui pembandingan antara temuan lapangan dan data tertulis, sebagaimana disarankan dalam metode triangulasi data oleh **Miles, Huberman, dan Saldaña (2014)**.

Dengan demikian, kombinasi antara **data primer dan sekunder** diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai **peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan** di Kelurahan Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung.

## **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif karena menentukan kedalaman dan keabsahan informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan **tiga teknik utama**, yaitu **wawancara mendalam (in-depth interview)**, **observasi**, dan **dokumentasi**.  
Pendekatan ini juga digunakan oleh **Sari (2022)** dalam penelitiannya yang serupa, dengan tujuan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang peran kepemimpinan lurah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di tingkat kelurahan.

#### **1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)**

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada informan kunci yang dianggap mengetahui secara rinci tentang topik penelitian. Teknik ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terhadap **kepemimpinan lurah serta bentuk partisipasi masyarakat** dalam kegiatan pembangunan.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas:

* **Lurah Way Halim Permai**, sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat kelurahan;
* **Perangkat kelurahan**, termasuk sekretaris dan kepala seksi pembangunan;
* **Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat**, yang berperan dalam mengorganisasi partisipasi warga;
* **Masyarakat umum**, sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku pembangunan.

Teknik wawancara ini menggunakan **panduan wawancara semi-terstruktur**, agar peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang fleksibel sesuai situasi di lapangan, namun tetap berpedoman pada fokus penelitian.  
Menurut **Moleong (2019)**, wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggali makna mendalam dan menjelaskan fenomena sosial secara lebih kontekstual.

#### **2. Observasi**

Selain wawancara, peneliti juga melakukan **observasi langsung di lapangan** untuk mengamati aktivitas dan interaksi yang terjadi antara lurah, aparat kelurahan, dan masyarakat dalam proses pembangunan. Observasi ini dilakukan secara **partisipatif pasif**, di mana peneliti hadir di lokasi namun tidak terlibat langsung dalam kegiatan.

Melalui observasi, peneliti mencatat situasi sosial, perilaku kepemimpinan lurah, pola komunikasi, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.  
Pendekatan observasi ini juga diterapkan dalam penelitian **Sari (2022)** untuk memperkuat data hasil wawancara dan memperoleh gambaran empiris yang faktual mengenai dinamika pembangunan di Kelurahan Way Halim Permai.

#### **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan **data sekunder** berupa dokumen tertulis, laporan kegiatan, dan arsip resmi yang relevan dengan fokus penelitian.  
Dokumen yang dianalisis meliputi:

* Profil Kelurahan Way Halim Permai;
* Data kegiatan pembangunan dan laporan partisipasi masyarakat;
* Notulen rapat, surat keputusan, serta laporan tahunan kelurahan;
* Hasil penelitian terdahulu, termasuk karya **Sari (2022)** dan referensi ilmiah terkait kepemimpinan lokal serta partisipasi masyarakat.

Teknik dokumentasi ini berfungsi untuk **melengkapi dan memverifikasi data** hasil wawancara dan observasi, sebagaimana prinsip **triangulasi sumber** yang dijelaskan oleh **Miles, Huberman, dan Saldaña (2014)**.

Dengan menggunakan ketiga teknik tersebut — wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi — diharapkan data yang diperoleh bersifat **komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah**. Teknik ini juga memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata di lapangan sesuai dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan oleh **Sari (2022)**.

## **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif untuk menafsirkan dan memahami makna dari data yang telah dikumpulkan di lapangan.  
Menurut **Miles, Huberman, dan Saldaña (2014)**, analisis data kualitatif dilakukan secara **interaktif dan berlangsung terus-menerus** selama proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan **model analisis interaktif Miles dan Huberman** yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

#### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.  
Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai **peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Kelurahan Way Halim Permai**.

Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data meliputi:

* Menyalin dan menelaah hasil wawancara dengan lurah, perangkat kelurahan, dan masyarakat;
* Mengelompokkan data sesuai tema, seperti gaya kepemimpinan, strategi pemberdayaan, dan bentuk partisipasi masyarakat;
* Menghapus data yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

Sebagaimana dijelaskan oleh **Sari (2022)**, reduksi data membantu peneliti memusatkan perhatian pada informasi yang benar-benar mendukung analisis terhadap fenomena kepemimpinan lurah dan partisipasi masyarakat.

#### **2. Penyajian Data (Data Display)**

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dianalisis.  
Penyajian data dilakukan melalui **narasi deskriptif**, **matriks**, **tabel tematik**, atau **bagan hubungan antar konsep**, agar peneliti dapat melihat pola hubungan dan keterkaitan antar kategori data.

Dalam konteks penelitian ini, penyajian data meliputi:

* Deskripsi hasil wawancara tentang gaya dan strategi kepemimpinan lurah;
* Pola partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
* Hambatan serta upaya peningkatan kolaborasi antara aparat kelurahan dan warga.

Pendekatan ini juga digunakan oleh **Sari (2022)** untuk menjelaskan hubungan antara peran kepemimpinan lurah dan tingkat keterlibatan masyarakat secara sistematis.

#### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)**

Tahap terakhir dalam analisis data adalah **menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi** terhadap temuan penelitian.  
Kesimpulan diperoleh dengan menafsirkan makna dari data yang telah disajikan, kemudian dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk memastikan keabsahannya.

Peneliti melakukan proses **verifikasi berulang** melalui teknik triangulasi sumber dan metode, dengan cara:

* Membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi;
* Memastikan konsistensi data antar informan;
* Menyusun kesimpulan yang logis, faktual, dan mendalam tentang peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh **Miles & Huberman (2014)** dan diterapkan oleh **Sari (2022)**, proses analisis ini bersifat **siklikal** (berulang), di mana peneliti terus meninjau kembali data untuk memastikan validitas dan keakuratan interpretasi sebelum menarik kesimpulan akhir.

## **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, reliabel, dan dapat dipercaya (trustworthy). Menurut **Moleong (2019)**, dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak hanya diukur dari segi kuantitatif, tetapi juga dari **kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas** hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data dilakukan melalui beberapa langkah utama, yaitu: **triangulasi sumber dan teknik, perpanjangan keikutsertaan, dan peningkatan ketekunan penelitian.**

#### **1. Triangulasi Sumber dan Teknik**

**Triangulasi** merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi melalui berbagai sumber atau metode.  
Menurut **Miles, Huberman, dan Saldaña (2014)**, triangulasi berfungsi untuk mengurangi bias subjektif peneliti dan meningkatkan keakuratan data yang diperoleh.

* **Triangulasi sumber** dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga.  
  Misalnya, data mengenai strategi kepemimpinan lurah akan diverifikasi melalui pandangan staf kelurahan dan masyarakat penerima manfaat program pembangunan.
* **Triangulasi teknik** dilakukan dengan membandingkan hasil **wawancara**, **observasi**, dan **dokumentasi**.  
  Jika hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat aktif berpartisipasi, maka peneliti memeriksa dokumen kegiatan dan melakukan observasi langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya.

Teknik triangulasi ini juga digunakan oleh **Sari (2022)** untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai narasumber di Kelurahan Way Halim Permai benar-benar menggambarkan kondisi faktual.

#### **2. Perpanjangan Keikutsertaan (Prolonged Engagement)**

Perpanjangan keikutsertaan dilakukan agar peneliti dapat lebih memahami konteks sosial yang diteliti serta membangun hubungan kepercayaan dengan informan.  
Peneliti menghabiskan waktu yang cukup lama di lokasi penelitian untuk melakukan wawancara berulang, pengamatan langsung, serta memahami pola interaksi antara **lurah dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.**

Menurut **Moleong (2019)**, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin tinggi tingkat kepercayaan informan untuk memberikan data yang jujur dan akurat.  
Dalam penelitian **Sari (2022)**, peneliti juga melakukan perpanjangan keikutsertaan selama beberapa minggu untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik kepemimpinan dan partisipasi masyarakat di kelurahan.

#### **3. Peningkatan Ketekunan (Persistent Observation)**

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara terus-menerus dan mendalam terhadap aspek-aspek penting yang relevan dengan fokus penelitian.  
Peneliti melakukan pengamatan berulang pada kegiatan pembangunan, rapat kelurahan, dan interaksi antara aparat dan warga untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai kesempatan.

Melalui **ketekunan pengamatan**, peneliti dapat membedakan antara informasi yang bersifat umum dengan informasi yang penting dan mendalam, sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan faktual.  
Metode ini juga diterapkan oleh **Sari (2022)** dalam memperkuat validitas hasil analisisnya terkait pola kepemimpinan partisipatif di tingkat kelurahan.

#### **4. Diskusi dengan Rekan Sejawat (Peer Debriefing)**

Peneliti melakukan diskusi dengan dosen pembimbing atau rekan sejawat untuk menguji pemahaman dan interpretasi terhadap data yang diperoleh.  
Langkah ini bertujuan untuk menghindari subjektivitas peneliti dalam menafsirkan data lapangan.  
Menurut **Sugiyono (2020)**, diskusi sejawat merupakan bentuk refleksi ilmiah agar analisis data kualitatif tetap konsisten dengan fakta empiris.

#### **5. Pemeriksaan Ulang Data (Member Check)**

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau temuan sementara kepada informan untuk memastikan bahwa data yang dicatat peneliti sesuai dengan maksud dan pengalaman informan.  
Langkah ini bertujuan untuk **meningkatkan kredibilitas dan akurasi data**.  
Sebagaimana dilakukan oleh **Sari (2022)**, proses member check membantu memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan pandangan dan kondisi nyata masyarakat yang diteliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

* Nugroho, R., & Sari, A. (2024). Kepemimpinan transformasional kepala desa dalam meningkatkan kinerja pembangunan desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1).
* Fitriani, D., & Mulyono, H. (2024). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jurnal Administrasi Publik Indonesia.
* Rahmadani, L. (2023). Gaya kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi.
* Hidayat, M. (2023). Kepemimpinan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat di desa. Jurnal Pembangunan dan Masyarakat.
* Siregar, Y., & Hutapea, N. (2022). Analisis peran kepala desa dalam meningkatkan keterlibatan warga pada program pembangunan. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.
* Wulandari, T. (2022). Partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan pembangunan desa. Jurnal Pemerintahan Daerah.
* Fauzi, A. (2021). Kepemimpinan kepala desa berbasis good governance. Jurnal Tata Kelola Desa.
* Sulastri, E. (2021). Implementasi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
* Ramadhan, I. (2020). Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jurnal Kajian Pemerintahan.
* Lestari, N. (2019). Peran kepala desa sebagai motivator dalam pembangunan desa. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik.

### **Buku**

* Sedarmayanti. (2023). Kepemimpinan dalam organisasi publik. Refika Aditama.
* Nawawi, H. (2022). Administrasi publik dan pembangunan desa. Gadjah Mada University Press.
* Hasibuan, M. S. P. (2022). Manajemen sumber daya manusia. Bumi Aksara.
* Syafri, U. (2021). Kepemimpinan pemerintahan daerah dan desa. Prenadamedia Group.
* Ndraha, T. (2021). Pembangunan masyarakat. Rineka Cipta.  
  Ife, J., & Tesoriero, F. (2020). Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era modern. Pustaka Pelajar.
* Suharto, E. (2020). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alfabeta.
* Yukl, G. (2019). Leadership in organizations. Pearson Education.
* Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). Organizational behavior. Pearson.
* Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2018). The new public service: Serving, not steering. Routledge.

**SKIRIPSI**

* Sari, M. D. (2022). Kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Kelurahan Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung (Skripsi, Universitas Lampung). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (UNILA).
* Putri, M. R. (2022). Hubungan gaya kepemimpinan kepala desa dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Sleman [Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta].